

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA**

RINGKASAN SKRIPSI



Oleh:

Dias Endar Pratama

NIM. 13401241076

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA

Disusun oleh:

Dias Endar Pratama
NIM 13401241076

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Program Studi
Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Yogyakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2017

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Chandra Dewi P., S.H., LL.M. Ketua Penguji/Pembimbing		19/10/2017
Dr. Suharno, M. Si. Sekretaris		19/10/2017
Iffah Nur Hayati, M.Hum. Penguji		19/10/2017

Yogyakarta, 23 Oktober 2017
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,


Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA

Oleh:

Dias Endar Pratama dan Chandra Dewi Puspitasari, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata. Selain itu juga bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, dengan subjek penelitian yaitu: Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata dan Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan cross check. Analisis data yang digunakan adalah analisis data induktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata meliputi; (1) program pengembangan desa wisata; dan (2) program pengembangan destinasi wisata. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata diantaranya meliputi; (1) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), (2) keterbatasan anggaran dana; (3) kurangnya dukungan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Kata kunci: Pemerintah Kabupaten Kebumen, pengentasan kemiskinan, sektor pariwisata.

I. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah kemiskinan. Kondisi kemiskinan ini terjadi karena rakyat tidak memiliki kemampuan memenuhi hidupnya secara standar dan layak. Masalah kemiskinan menjadi masalah yang cukup serius karena akan menimbulkan berbagai dampak di masyarakat terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan adalah menyebabkan hilangnya (1) kesejahteraan bagi kalangan miskin (sandang, pangan, papan), (2) hak akan pendidikan, (3) hak atas kesehatan, (4) tersingkirnya dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, (5) termarginalkan dari hak atas perlindungan hukum, (6) hak atas rasa aman, (7) hak atas partisipasi terhadap pemerintahan dan keputusan publik, (8) hak atas spiritualitas, (9) hak untuk berinovasi, dan yang lebih penting (10) hak atas kebebasan hidup (Arip Muttaqien, 2006: 4).

Kemudian pentingnya masalah kemiskinan untuk segera diatasi adalah berkaitan dengan pemenuhan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Hal ini seperti yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwasanya “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Salah satu bentuk keseriusan dan tanggungjawab negara dalam mengatasi masalah kemiskinan dalam rangka pemenuhan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lebih lanjut mengenai pengertian kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Sasaran utama yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah setiap warga negara yang terkategori mengalami masalah kesejahteraan sosial. Ketentuan mengenai kategori warga negara yang mengalami “masalah kesejahteraan sosial” ini diterangkan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) yaitu mereka yang miskin, terpicil, rentan sosial ekonomi.

Selanjutnya mengenai permasalahan kemiskinan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Penjelasan mengenai penanganan fakir miskin terdapat dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara”.

Berkaca dari kutipan pasal di atas bahwasanya pemerintah daerah juga mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mengatasi masalah kemiskinan. Peran pemerintah daerah tersebut dapat berupa pembentukan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah.

Tabel 1. Daftar 5 Kabupaten/Kota dengan Persentase Angka Kemiskinan Tertinggi di Jawa Tengah Tahun 2016

No.	Nama Kab.	Angka Kemiskinan (%)
1	Kabupaten Wonosobo	20.53 %
2	Kabupaten Kebumen	19.86 %
3	Kabupaten Brebes	19.47 %
4	Kabupaten Purbalingga	18.98 %
5	Kabupaten Rembang	18.54 %

Sumber: <http://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1386>. diakses pada tanggal 16 Agustus 2017

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 relatif tinggi dengan persentase sebesar 19.86 %.

Persentase tersebut menempatkan Kabupaten Kebumen menempati peringkat kedua sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah tahun 2016 di bawah Kabupaten Wonosobo dengan 20.53 %.

Terkait dengan persoalan kemiskinan, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup strategis dalam memecahkan persoalan kemiskinan. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata diyakini tidak hanya sekedar mampu menjadi sektor andalan dalam usaha meningkatkan perolehan devisa untuk pembangunan yang sekarang sedang giat-giatnya dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah, akan tetapi juga mampu mengentaskan kemiskinan (Yoeti, 2008: 14).

Kabupaten Kebumen memiliki beragam objek wisata yang menarik. Hal ini karena letak geografis Kabupaten Kebumen yang berupa dataran rendah dan pantai di sebelah selatan dan dataran tinggi di sebelah utara. Ada berbagai macam objek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kebumen, seperti:

- a. Wisata pantai: Pantai Petanahan, Pantai Suwuk, Pantai Karangbolong, Pantai Menganti, Pantai Logending, Pantai Lampon
- b. Wisata Goa: Goa Jatijajar, Goa Petruk, dan Goa Barat
- c. Wisata sejarah: Benteng Van der wijck
- d. Wisata waduk: Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang
- e. Wisata Air Panas: Pemandian Air Panas (PAP) Krakal

Pariwisata akan memberikan dampak yang positif, terutama bagi sektor perekonomian. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari pengembangan pariwisata seperti lapangan pekerjaan baru, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah, mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor ekonomi lainnya. melalui berbagai dampak yang ditimbulkan dari sektor pariwisata terhadap sektor ekonomian tersebut akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mampu mengentaskan kemiskinan.

Untuk mengembangkan sektor pariwisata perlu adanya peran dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daerah dan masyarakat. Pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata adalah dengan

menyediakan berbagai infrastruktur seperti memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah daerah dengan pihak swasta, serta pengaturan dan promosi. Selain itu juga perlunya pelibatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan melalui pengembangan pariwisata. Dengan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pembagian hasil maka mereka dapat memperoleh manfaat dari pengembangan pariwisata. (Janianton Damanik, 2013: 9).

Banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kebumen tentu cukup mengherankan bila melihat fakta bahwa pada tahun 2016 angka kemiskinan Kabupaten Kebumen menempati peringkat kedua di Jawa Tengah. Sebab seharusnya pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memanfaatkan potensi pariwisatanya dengan optimal, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini dibatasi pada pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata sehingga bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata dan mendeskripsikan hambatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata.

I. KAJIAN PUSTAKA

1. Pemerintah Daerah

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah daerah kabupaten/kota yang merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja untuk bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya yang dimaksud dengan kepala daerah dalam penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa perangkat daerah yang bertujuan untuk membantu tugas Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten/kota terdiri dari: (a) sekretariat daerah; (b) sekretariat DPRD; (c) inspektorat; (d) dinas; (e) badan; dan (f) kecamatan. Berkaitan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penelitian ini adalah dinas daerah pada tingkat Kabupaten yang merupakan perangkat daerah yang bertujuan untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, masalah kemiskinan termasuk kedalam ranah bidang sosial sehingga masalah tersebut masuk kedalam klasifikasi urusan pemerintahan konkuren pada sub urusan urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan wajib tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Selanjutnya terkait dengan sektor pariwisata termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan pilihan. Setiap daerah memiliki potensi unggulan daerah yang khas untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Kemiskinan

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata "miskin" yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Nurhadi (2007: 13) menyebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (*povertyline*) atau batas kemiskinan (*povertytreshhold*).

Secara umum kemiskinan dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidakmampuan atau kekurangmampuan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses

dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018).

Menurut Frank Ellis (dalam Edi Suharto, 2010: 133 - 135) kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis.

a. Kemiskinan ekonomi

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

b. Kemiskinan politik

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuatan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan *resources*.

c. Kemiskinan sosial-psikologis

Secara sosial-psikologis, kemiskinan menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktifitas.

3. Pariwisata

James J. Spillane (2001: 20) mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, dan berziarah. Kemudian pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Berkaca dari berbagai pendapat mengenai definisi pariwisata di atas, dapat ditarik benang merah bahwasanya pariwisata adalah kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang yang dilakukan di luar rumah dengan tujuan untuk bersenang-senang, memperoleh kenikmatan maupun untuk istirahat. Selain itu pariwisata juga berhubungan dengan berbagai fasilitas dan pelayanan dari berbagai elemen yakni masyarakat, pengusaha, pemerintah, maupun pemerintah daerah. Wujud dari fasilitas dan pelayan tersebut seperti objek wisata, penginapan, angkutan wisata, biro perjalanan dan rumah makan.

Menurut James J. Spillane (2001: 28-31), jenis pariwisata dibagi menjadi enam yaitu :

- a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*),
- b. Pariwisata untuk rekreasi,
- c. Pariwisata untuk kebudayaan (*cultur tourism*),
- d. Pariwisata untuk olah raga (*sport tourism*),
- e. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (*business tourism*),

Pengentasan kemiskinan melalui pariwisata adalah usaha untuk mengembangkan sektor pariwisata agar mampu menciptakan *multiplier effect* yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan. Berbagai dampak yang ditimbulkan dari pariwisata terhadap masyarakat adalah perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, pemerataan pembangunan antar wilayah, dan menciptakan peluang usaha baru.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan pariwisata menggunakan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat. Masyarakat kini bukan lagi sebagai objek melainkan sebagai subjek dalam pengembangan pariwisata. Intinya dalam pengembangan pariwisata masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan jenis dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa data yang

mendeskripsikan mengenai upaya pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata dan hambatan apa yang dihadapi dalam upaya tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata (Disporawisata) Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 1 Kebumen, Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2017. Pemilihan lokasi tersebut karena Disporawisata merupakan dinas yang berwenang mengurus sektor pariwisata untuk mengentaskan kemiskinan.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara *purposive*. Menurut Sugiyono (2009: 218-219) yang dimaksud dengan *purposive* yakni teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Disporawisata dan Kepala seksi Sumber Daya Pariwisata Disporawisata. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peraturan Bupati Kebumen No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata;
3. Peraturan Bupati Kebumen No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata;
4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
5. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tahun 2011-2015, dan 2016;

Pengujian keabsahan data menggunakan teknik crosscheck, yaitu strategi pengumpul data ganda pada objek yang sama untuk menguji tiap temuan dan mengeliminasi interpretasi-interpretasi yang tidak akurat (Burhan

Bungin, 2012: 95-96). Oleh karena itu agar data menjadi absah maka crosscheck dilakukan dengancara mengecek, membandingkan, dan mencocokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa subjek penelitian dengan data yang diperoleh dari hasil studi dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik berpikir induktif, yakni berangkat dari hal-hal khusus menuju ke hal-hal yang umum. Analisis data dilakukan dengan cara memilih dan mengelompokkan data dari berbagai sumber yang memiliki kesamaan yang berarti sesuai dengan fakta untuk ditarik kesimpulan. Proses analisis data ini melalui tahap reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Melalui teknik berpikir induktif maka diperoleh kesimpulan berupa upaya pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dalam pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata serta hambatan yang dialami.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Sektor Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Kebumen, dalam hal ini adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata (Selanjutnya disebut Disporawisata) selaku bagian dari Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen telah melaksanakan urusan pemerintahan pilihan yakni pengembangan sektor pariwisata. Adapun sektor pariwisata dikembangkan salah satu tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang masih tinggi.

Terdapat dua upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata yakni dengan pengembangan desa wisata dan pengembangan destinasi wisata. Berdasarkan hasil penelitian, kedua upaya tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut ini pembahasan lebih lanjut mengenai upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata.

1. Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata ini diharapkan mampu meningkatkan pariwisata di Kabupaten Kebumen agar bisa menjangkau masyarakat-masyarakat desa untuk terlibat sehingga akan memunculkan peluang usaha baru. Desa wisata sendiri merupakan wilayah pedesaan yang mempunyai berbagai karakteristik dan kekhasan khusus yang dapat menjadi tujuan pariwisata.

Berkaitan dengan pengembangan desa wisata Disporawisata berperan dalam melakukan pembinaan dan promosi. Hal ini dikarenakan pengelolaan desa wisata yang sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat melalui pokdarwis.

a. Pembinaan

Disporawisata secara berkala dan berkelanjutan melakukan pembinaan kepada pokdarwis selaku pengurus desa wisata. Pembinaan ini dilakukan pada hari Selasa minggu kedua setiap bulannya yang tempatnya bergantian pada setiap desa wisata, namun untuk awal tahun pembinaan diadakan di kantor Disporawisata Kabupaten Kebumen.

Sistem pembinaan tersebut disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan dari pokdarwis itu sendiri. Jadi untuk pembinaan bulan depan tema ditentukan pada pembinaan bulan sebelumnya. Fokus utama pembinaan ini adalah peningkatan usaha di bidang pariwisata dan pengelolaan desa wisata.

Pembinaan terhadap peningkatan usaha di bidang pariwisata dilakukan untuk mendorong masyarakat membuka usaha di bidang pariwisata, baik itu usaha dagang maupun usaha jasa. Hal ini bertujuan untuk membuka peluang dan kesempatan kerja baru bagi masyarakat sekitar desa wisata sehingga mampu meningkatkan perekonomiannya yang nantinya akan mampu mengentaskan kemiskinan.

Fokus pembinaan selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan desa wisata. Hal ini dikarenakan keberhasilan pengembangan desa wisata agar mampu mengentaskan kemiskinan sangat bergantung kepada kesiapan dan dukungan masyarakat itu sendiri. Selain itu dalam desa wisata masyarakat juga akan bersinggungan langsung dengan para wisatawan baik sebagai pengelola maupun sebagai pelayan yang nantinya akan menimbulkan berbagai interaksi antar masyarakat dan para wisatawan.

Terkait pengelolaan desa wisata Disporawisata melakukan pembinaan terhadap pokdarwis selaku pengelola desa wisata. Pembinaan tersebut seperti manajemen pengelolaan yang baik, pemanfaatan potensi wisata secara bijak, pengelolaan limbah, penataan ruang, dan pengadaan sarana dan prasarana.

b. Promosi

Disporawisata juga melakukan promosi desa wisata dengan mengadakan festival desa wisata tanggal 20 dan 21 Mei 2017 yang bertempat di alun-alun Kabupaten Kebumen dan pendopo rumah dinas Bupati. Festival desa wisata tersebut diikuti 18 desa wisata yang ada di Kabupaten Kebumen.

Festival desa wisata terbagi dalam dua bagian acara, tanggal 20 Mei 2017 diadakan acara pameran desa wisata, yakni setiap desa wisata diharapkan mampu memberikan suguhan mengenai potensi, kekhasan dan konsep desa wisata yang dikembangkan kepada para pengunjung acara tersebut. Kemudian tanggal 21 Mei 2017 para peserta festival desa wisata diharuskan mempresentasikan di depan para juri mengenai potensi desanya, apa yang menjadi nilai jual, kekhasan desanya dibanding yang lain, bagaimana pengelolaan desa wisatanya selama ini, program-program kedepannya guna pengembangan desa wisatanya, bantuan yang dibutuhkan dari pemerintah, serta kendala dalam pengelolaan maupun pengembangannya. Selain itu para peserta juga diharuskan

menampilkan satu atraksi yang akan mereka jual untuk menarik minat wisatawan.

2. Pengembangan destinasi wisata

Pengembangan destinasi wisata oleh Disporawisata lebih menekankan dalam peningkatan infrastruktur yang ada di objek wisata. Selain itu pelibatan masyarakat dalam kepariwisataan juga menjadi perhatian dari Disporawisata dalam pengembangan destinasi wisata.

a. Peningkatan infrastruktur

Peningkatan infrastruktur yang dilakukan oleh Disporawisata dalam pengembangan destinasi wisata terwujud dengan pengadaan berbagai sarana di objek wisata. Selain itu, pembangunan berbagai prasarana juga dilakukan Disporawisata dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Kebumen. Peningkatan infrastruktur tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan kepariwisataan yang salah satunya untuk menghapus kemiskinan.

Peningkatan sarana objek wisata oleh Disporawisata terwujud dengan pengadaan berbagai alat pendukung kegiatan kepariwisataan. Sarana pendukung tersebut seperti pengadaan peralatan keselamatan alat susur goa di objek wisata Goa Jatijajar dan Goa Barat serta pengadaan kapal wisata dan jet ski di objek wisata Pantai Logending.

Kemudian peningkatan prasarana yakni seperti pembangunan pasar wisata dan taman di objek wisata Goa Jatijajar, pembangunan gerbang masuk dan taman di objek wisata Pantai Logending, dan pembangunan warung, taman, serta fasilitas bermain anak di objek wisata Pantai Karangbolong.

b. Pelibatan masyarakat

Pengembangan destinasi wisata juga mencakup pelibatan masyarakat dalam kepariwisataan. Adapun keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan di Kabupaten Kebumen yakni dengan menjadi Buruh Tak Terlatih (BTT), Mas dan Mbak Duta Wisata, dan ikut dalam komunitas pariwisata.

Buruh tak terlatih (BTT) dalam setiap objek wisata ini berjumlah lima orang. Walaupun hanya berjumlah lima orang tetapi keberadaannya sangat membantu pengelola objek wisata terutama saat objek wisata ramai seperti musim liburan dan lebaran. Tugas utama dari BTT ini adalah membantu pengelolaan di objek wisata terutama untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di objek wisata.

Kemudian Disporawisata terus mendorong partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan dengan mengadakan pemilihan Mas dan Mbak duta wisata. Tugas utama Mas dan Mbak duta wisata adalah sebagai agen perubahan, pelopor dan, penggerak, kesadaran pariwisata di Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya berbagai komunitas-komunitas pariwisata dan kelompok-kelompok sadar wisata mulai banyak terbentuk. Komunitas-komunitas tersebut seperti Kebumen Memotret, Kebumen Keren, dan Plesir Kebumen. Komunitas-komunitas tersebut giat mempromosikan pariwisata Kabupaten Kebumen terutama melalui media sosial. Selain itu Disporawisata juga bekerjasama dengan komunitas Kebumen Memotret untuk membuat booklet yang berisi peta wisata lengkap dengan petunjuk jalan dan jarak tempuh.

B. Hambatan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengentasan Kemiskinan Melalui Sektor Pariwisata

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen dalam usahanya untuk mengentaskan kemiskinan melalui pariwisata terhambat akibat kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Kurangnya SDM tersebut terjadi baik di tingkat Disporawisata sendiri maupun di tingkat pengelola objek wisata.

Adapun kurangnya sumber daya manusia terletak pada kualitas maupun kuantitasnya. Dilihat dari segi kualitas kurangnya sumber daya manusia terlihat pada kurangnya tenaga ahli di bidang pariwisata yang dimiliki oleh Disporawisata. Kemudian dari segi kuantitas kurangnya

SDM yang dimiliki oleh Disporawisata terlihat pada minimnya jumlah pengelola yang ada pada objek wisata. Satu objek wisata hanya dikelola oleh 5 sampai 6 pengelola dari Disporawisata yang dibantu oleh 5 sampai 6 dari masyarakat sekitar sebagai Buruh Tak Tetap (BTT).

2. Kurangnya Anggaran Dana

Kurangnya anggaran dana ini tentu akan berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata dimana dalam usahanya untuk memajukan pariwisata tentu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Kurangnya anggaran dana dalam sektor pariwisata ini akan sangat berpengaruh terhadap perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana di objek wisata serta peningkatan pelayanan terhadap para wisatawan. Sarana dan prasarana yang memadai di objek wisata akan menarik wisatawan untuk berkunjung. Sedangkan pelayanan yang baik di objek wisata akan membuat para wisatawan menjadi betah sehingga uang yang dibelanjakan juga akan lebih banyak.

Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana menjadi agak terhambat dengan kurangnya anggaran dana ini, seperti diketahui sarana dan prasarana ini erat kaitannya dengan pembangunan fisik sehingga memerlukan dana yang tidak sedikit. Banyak objek wisata di Kabupaten Kebumen sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum memadai, seperti di Pemandian Air Panas (PAP) Krakal yang lahan parkirnya sangat sempit dan sarana bermain anak banyak yang sudah rusak.

3. Kurangnya dukungan dari masyarakat dalam pengembangan pariwisata

Pengelolaan pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya didukung oleh masyarakat. Masyarakat seakan tidak terlalu mendukung akan pengelolaan dan pengembangan pariwisata oleh Pemerintah Daerah. Melihat realitas tersebut upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata ini justru mendapat hambatan dari masyarakat sendiri.

Hambatan dari masyarakat tersebut lebih disebabkan oleh pola pikir masyarakat itu sendiri. Pola pikir masyarakat masih lebih mementingkan profit instan daripada profit jangka panjang yang disebabkan oleh multiplier effect yang ditimbulkan oleh pariwisata.

Selanjutnya masyarakat juga masih belum mampu membaca peluang usaha yang timbul dengan adanya kegiatan pariwisata di wilayahnya. Padahal banyak peluang usaha yang dimiliki oleh masyarakat pada sektor pariwisata. Ada beberapa usaha yang bisa ditawarkan oleh masyarakat kepada para wisatawan seperti usaha dagang baik makanan, minuman, maupun cenderamata khas objek wisata. Selain itu usaha jasa yang berupa tour guide, penyewaan kuda, penyewaan hiburan anak, dan penyewaan homestay juga bisa dilakukan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pemerinatah Kabupaten Kebumen dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Sektor Pariwisata

Terdapat dua upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kebumen dalam pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata yakni:

a. Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa baik itu Sumber Daya Alamnya (SDA) maupun Sumber Daya Manusianya (SDM). Dibukanya wisata di desa akan membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya melalui usaha jasa maupun usaha dagang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

b. Pengembangan destinasi wisata

Pengentasan kemiskinan melalui pengembangan destinasi wisata oleh Disporawisata lebih menekankan dalam peningkatan infrastruktur baik itu sarana maupun prasarana yang ada di objek wisata. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat yang akan meningkatkan perekonomiannya dan secara tidak langsung akan mampu mengentaskan kemiskinan. Selain itu pelibatan masyarakat dilakukan dalam bentuk rekrutmen sebagai buruh tak terlatih (BTT), pemilihan duta wisata, dan promosi.

2. Hambatan Pemerintah Kabupaten Kebumen Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Sektor Pariwisata

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Disporawisata Kabupaten Kebumen dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui pariwisata terhambat dengan kurangnya sumber daya manusia. Keterbatasan SDM tersebut bias terlihat dari segi kualitas maupun kuantitas.

b. Kurangnya Anggaran Dana

Hambatan ini muncul pada program pengembangan destinasi wisata dimana dalam peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata, dan pemasaran pariwisata terbentur alokasi dana. Hal ini mengakibatkan belum semuanya sarana dan prasarana di destinasi wisata dalam keadaan baik dan juga program pemasaran pariwisata belum berjalan maksimal.

c. Kurangnya dukungan masyarakat dalam pengembangan pariwisata

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata masih belum sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini karena pola pikir masyarakat yang ingin segera mendapat keuntungan (*provit*) dari sektor pariwisata dalam waktu yang singkat serta masyarakat masih

belum mampu menangkap berbagai peluang usaha yang ada pada sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomiannya.

B. SARAN

Berdasarkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas bagi pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata serta kepada pengelola dan pelaku usaha di sektor pariwisata. Secara kualitas dengan meningkatkan intensitas pembinaan bagi pegawai Dinas dan pengelola pariwisata, serta secara kuantitas dengan menambah pengelola pariwisata dengan lebih banyak melibatkan masyarakat.
2. Perlunya program/kebijakan baru dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang secara spesifik mampu mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata, seperti bantuan alat dan modal usaha kepada masyarakat untuk bekerja maupun membuka usaha di sektor pariwisata.
3. Perlunya kerjasama antar dinas dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata. Selama ini walaupun setiap dinas salah satu tujuannya adalah untuk menghapus kemiskinan akan tetapi masih berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan kerjasama antar dinas untuk memecahkan masalah kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arip Muttaqien. 2006. *Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan: Rekonstruksi Arah Pembangunan Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan, Terbebaskan Dan Demokratis*. Jakarta: Khanata-Pustaka LP3ES Indonesia.
- Burhan Bungin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raajawali Press.
- Criswardani Suryawati. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. JMPK Volume 08 No. 3.
- Deddy Mulyana. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Edi Suharto. 2012. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Gamal Suwanto. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- H.A.W. Widjaja. 2007. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadari Nawawi. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Hari Susanto. 2006. *Dinamika Penanggulangan Kemiskinan: Tinjauan Hsitoris Era Orde Baru*. Jakarta: Khanata Pustaka LP3ES Indonesia.
- I Ketut Suwena & I Gst Ngr Widyatmaja, 2010. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Udayana University Press
- I Putu Anom. 2010. *Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global: Pembangunan Kepariwisata Berkelanjutan*. Bali: Udayana University Press.
- James J. Spillane. 2001. *Ekonomi Pariwisata: Sejarah Dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.

- Janianton Damanik. 2013. *Pariwisata Indonesia Antara Peluang Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Janianton Damanik, dkk. 2005. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata*. Yogyakarta: Kepel Press Yogyakarta.
- Kemal A. Stamboel. 2012. *Panggilan Keberpihakan Strategi Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad Nasir, dkk. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo*. Eksekutif Vol. 5 No. 2, Agustus 2008.
- Nurhadi, 2007. *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Oka A Yoeti. 2008. *Ekonomi Pariwisata Introduksi, Informasi, Dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). 2011. *Panduan Pengentasan Kemiskinan Melalui Sektor Pariwisata*. Jakarta: ILO.
- Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Riduwan. 2010. *Metode Dan Tehnik Menyusun Thesis*. Bandung: Alfabeta.
- Siswanto Sunarno. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjahya Supriatna. 2000. *Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tukiran, Agus Joko Pitoyo, Pande Made Kutanegara. 2010. *Akses Penduduk Miskin Terhadap Kebutuhan Dasar*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Salah Wahab. 2003. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Umi Listyaningsih. 2004. *Dinamika Kemiskinan Di Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

Daftar Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Daftar Website

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119> diakses pada tanggal 16 Agustus 2017

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1219> diakses pada tanggal 16 Agustus 2017

<http://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1386> diakses pada tanggal 16 Agustus 2017

http://pariwisata.kebumenkab.go.id/v2/daftar_galeri.php?jenis_menu_id=33&menu=Peta%20Wisata diakses pada tanggal 16 November 2016

<http://www.instagram.com/kebumenkeren> diakses pada tanggal 1 Agustus 2017